

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bantuan sosial merupakan bentuk kepedulian dari instansi terkait terhadap masyarakat yang kurang mampu. Pemberian biasanya memberikan bantuan sosial berbentuk uang tunai atau produk-produk sembako. Dukungan bantuan sosial ini adalah salah satu upaya dari pemerintah memerangi kemiskinan yang ada di Indonesia, menjamin, dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang memiliki nilai ekonomi yang kurang dan menambah tingkat kelayakan kehidupan bagi mereka yang menerimanya. Pemerintah daerah dalam upaya untuk memperlancar program bantuan sosial dengan cara mendata orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial.[1]. Penentuan masyarakat penerima bantuan sosial biasanya diatur dan ditentukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Upaya pemberian bantuan sosial dimaksudkan sebagai sarana untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental dan sosial (termasuk kondisi psikososial dan ekonomi) serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar dapat tetap hidup secara wajar (UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial)[2]. Adapun syarat utama penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu yang memiliki pendapatan dibawah standar cukup dalam memenuhi kebutuhan (Permensos No. 11 Tahun 2018)[3].

Bantuan sosial sendiri sudah berjalan cukup lama, dan selama waktu itu masyarakat telah mengalami dampaknya. Dampak dari pandemi COVID-19, keberadaan program bantuan sosial ini diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat. Bantuan sosial sebenarnya telah

di distribusikan secara adil oleh pemerintah, akan tetapi karena penyaluran bantuan sosial masih terkesan diskriminatif menjadikan ada masalah konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa dan dalam penyalurannya terdapat kendala waktu yang cukup lama dan kurang efektif.

Proses pendistribusian bantuan saat ini masih menggunakan metode manual, dengan setiap peserta datang ke balai desa dengan persyaratan yang diperlukan dan menunggu dalam antrian yang cukup panjang. Sementara dalam proses pengambilan juga memerlukan waktu per orang 5 menit atau lebih karena untuk mengisi data diri sebagai persyaratannya. Butuh beberapa saat untuk mempelajari hasil seleksi, sehingga cara ini akan memperlambat kinerja panitia. Permasalahan-permasalahan inilah yang sering terjadi dalam proses pendistribusian bantuan sosial tersebut. Masalah lainnya yang sering terjadi adalah tidak tepatnya sasaran bagi masyarakat penerima bantuan dan pengumpulan data yang rumit calon penerima bantuan.

Berdasarkan masalah yang ada, penulis mendapat ide untuk membuat Alat Penyaluran Bantuan Sosial Menggunakan E-KTP. Perangkat yang akan dibangun ini diharapkan dapat mempermudah perangkat desa dalam menjalankan program untuk mengurangi waktu dan proses dalam penyaluran bantuan, sehingga diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan mempermudah dalam proses pendataan masyarakat yang telah melakukan pengambilan bantuan sosial serta mengurangi potensi kecurangan yang ada.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, perumusan masalah dari perancangan sistem ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana perancangan sistem penyaluran bantuan sosial dengan E-KTP?
- b. Bagaimana merancang *web* data penerima bantuan sosial dapat diketahui menggunakan *My SQL*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Merancang alat penyaluran bantuan sosial dengan menggunakan E-KTP.
- b. Merancang *web* yang dapat menampilkan data penerima bantuan sosial menggunakan *My SQL*.

1.4 Batasan Masalah

Batasan-batasan masalah yang terdapat dalam perancangan ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Data Penduduk yang disajikan merupakan data dari Desa Pakunden Kecamatan Ponorogo.
- b. Hanya menampilkan penyajian informasi, tidak mendukung dalam pengambilan keputusan.
- c. Mikrokontroler pada alat ini menggunakan NodeMCU.
- d. Sistem pada alat ini hanya menggunakan E-KTP.
- e. Sensor yang digunakan menggunakan RFID.

1.5 Manfaat Perancangan

Manfaat dari perancangan sistem ini antara lain sebagai berikut:

- a. Mempermudah pengecekan data penerima bantuan di Desa.
- b. Menciptakan sebuah alat yang efektif untuk mempermudah pendistribusian bantuan sosial.
- c. Mencegah kemungkinan kecurangan dalam pemberian bantuan sosial.
- d. Diperoleh efisiensi waktu dalam pemberian bantuan sosial.